

Kebijakan Pemerintah Daerah guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Bidang Kesehatan di Jawa Barat

Local Government Policy Towards Sustainable Development Goals in the Health Sector in West Java

Santi Hapsari Dewi Adikancana

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
santidewina@gmail.com

Abstrak

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai isu global sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia. Tercapainya kualitas hidup yang sehat dan sejahtera memerlukan pelayanan kesehatan yang optimal. Berbagai permasalahan di bidang kesehatan harus diperhatikan dan diselesaikan sesuai dengan urutan prioritas. Diperlukan berbagai inovasi dengan penggunaan teknologi yang optimal. Beberapa daerah diketahui telah mencapai keberhasilan dalam upaya pencapaian masyarakat yang sehat, namun di berbagai daerah lainnya masih menghadapi tantangan. Berbagai tantangan tersebut harus dapat diatasi oleh berbagai pihak. Kerjasama dilakukan melalui pendekatan yang bersifat kolaboratif dan holistik. Pihak yang terlibat selain masyarakat, juga meliputi sektor swasta dan tentu saja pemerintah. Kesemuanya ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Jawa Barat.

Kata kunci: SDGs, tantangan, kesehatan, inovasi.

Abstract

The government's commitment to implementing the achievement of sustainable development goals as a global issue is in line with Indonesia's development goals. Achieving a healthy and prosperous quality of life requires optimal health services. Various problem in the health sector must be considered and resolved according to priority. Various innovations are needed with optimal use of technology. Several regions are known to have achieved success in efforts to achieve a healthy society, but in various other regions they still face challenges. In addition to being the government's task, these challenges must be overcome by various parties working together through a holistic and collaborative approach, involving the government, private sector, and community to create a healthier and more sustainable environment in West Java.

Keywords: SDGs, challenges, health, innovation.

PENDAHULUAN

1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembahasan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda nasional telah diperkenalkan sejak lama di Indonesia. Ini disebabkan karena permasalahan yang dialami terkait dengan tantangan pembangunan di Indonesia menjadi isu global yang juga dihadapi oleh sebagian negara-negara lain di seluruh dunia. Untuk itulah diperlukan komitmen yang serius dari Indonesia sehingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau

Sustainable Development Goals (SDGs)¹ dapat tercapai. Hal ini membawa konsekuensi bahwa apa yang menjadi suatu kesepakatan bersama-sama warga dunia, berkaitan pula dengan peningkatan kesejahteraan bangsanya.

Pencapaian SDGs tentu menjadi tujuan yang harus dicapai bersama oleh semua pihak, bukan hanya berfokus pada pemerintah. Tidak akan pernah ada rumus tunggal untuk mencapai tujuan dan target dari SDGs karena cakupannya yang luas meliputi isu lingkungan, ekonomi, sosial, tata kelola, juga kemitraan. Karakteristik khas dan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman, baik itu keragaman kepercayaan/agama, keragaman budaya, dan keragaman bahasa, tentu diperlukan suatu pendekatan yang multidisipin. Artinya, pencapaian SDGs difokuskan pada pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pihak yaitu akademisi, LSM, swasta, pemerintah dan tentu saja seluruh warga masyarakat yang terkait.

Pengelolaan yang komprehensif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pemantauan juga evaluasi diperlukan sehingga SDGs dapat tercapai. Di sisi lain, sumber daya yang dimiliki saat ini kondisinya terbatas. Untuk itu, harus ditentukan prioritas untuk mempertimbangkan hal-hal apa saja yang sekiranya mendesak dan menjadi prioritas untuk segera ditangani. Dari sekian banyak permasalahan yang ada, berikut ini isu-isu yang menjadi penting dan perlu fokus pembahasan, yang meliputi:² pertama, permasalahan berkaitan dengan kesehatan, khususnya perihal infrastruktur, akses mendapatkan pelayanan kesehatan, penyebaran tenaga medis, kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh tenaga medis, dan lain-lain. Kedua, berkaitan dengan pendidikan, termasuk di dalamnya berhubungan dengan kualitas pendidikan di Indonesia, akses pendidikan yang belum merata, jual beli gelar pendidikan dan lain-lain. Ketiga, permasalahan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, menjadi hal yang krusial untuk dibahas. Keempat, berkaitan dengan masalah perlindungan sosial; kelima permasalahan infrastruktur, keenam masalah layanan ekosistem dan biodiversitas, dan terakhir, permasalahan yang terkait dengan pembiayaan administrasi pemerintahan.

2. Penerjemahan Agenda Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai amanat dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28 H ayat (1). Pasal tersebut sebagai jaminan hak bagi setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari ketentuan Undang-Undang SJSN tersebut, terdapat salah satu program yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). UU SJSN mengamanatkan lahirnya sebuah lembaga yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebagai pelaksana JKN.

Amanat dari Undang-Undang SJSN, bahwa setiap warga negara atau setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dengan hidup yang layak akan dapat meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Berbagai program jaminan sosial selanjutnya diterjemahkan meliputi berbagai program diantaranya: jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pension, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kesehatan.

¹ Lihat lebih lanjut pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

² Seri Menyongsong SDGs Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2018

Pada tulisan ini akan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kesehatan. Optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional dideskripsikan dalam langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian. Berikut ini Tugas Menteri Kesehatan pada program JKN:³

- a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Regulasi yang sudah ada terkait JKN dievaluasi, dikaji, dan selanjutnya disempurnakan.
- b. mempercepat penyelesaian standarisasi pelayanan melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Standarisasi pelayanan merupakan hal yang krusial dalam program JKN.
- c. memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan sebagai peserta aktif pada JKN.
- d. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Pemerintah Daerah. Obat dan alat kesehatan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- e. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang kesehatan bersama Pemerintah Daerah. Sarana dan prasarana harus diperhatikan ketersediannya.
- f. menyempurnakan sistem tarif pelayanan kesehatan sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Kendali mutu dan kendali biaya menjadi dasar dalam sistem tarif pelayanan kesehatan.
- g. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh antar sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi JKN menyesuaikan pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- h. memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan promotif dan preventif harus menjadi prioritas dalam pencapaian JKN.
- i. meningkatkan implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta. Peran asuransi BUMN harus dikoordinasikan dengan baik di antara semua pihak penyelenggara jaminan.

3. Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Kesehatan

Pembahasan tulisan ini difokuskan pada langkah-langkah program JKN bersama Pemerintah Daerah khususnya poin huruf e di atas, yakni pertama, terkait jaminan atas ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, berkaitan dengan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA). Program ini sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Adapun indikator keberhasilan dari sebuah program pembangunan di bidang

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, tercantum dalam angka 9

kesehatan dapat diukur dari beberapa aspek, diantaranya dapat dilihat Angka Harapan Hidup, Rasio Kematian Bayi, dan Rasio Kematian Ibu.

PUSPA dilaksanakan melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sebagai upaya pencapaian kemandirian di sektor kesehatan, Reformasi Sistem Kesehatan Daerah. Pelayanan dasar kesehatan masyarakat harus dapat dipenuhi melalui puskesmas dengan cara penguatan kapasitas, kualitas SDM Kesehatan dan penguatan PUSPA itu sendiri. Pada program PUSPA, hal penting yang harus diperhatikan adalah terkait dengan kolaborasi dan kemitraan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penulis melakukan penelitian hukum melalui bahan-bahan kepustakaan. Semua data (bahan hukum primer berupa data sekunder) diteliti, dengan analisis menggunakan pendekatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tercapainya kehidupan yang sehat dan sejahtera merupakan salah satu tujuan SDGs, terutama tujuan yang ketiga.⁴ Kehidupan yang sehat dan sejahtera diwujudkan melalui berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah di setiap tingkatan, baik itu pemerintah di tingkat pusat maupun pemerintah di tingkat daerah.

Berikut ini peraturan yang mendasari atau sebagai landasan hukum yang terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, khususnya peraturan yang terkait bagi PUSPA, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun peraturan di tingkat daerah meliputi: 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan untuk Penyelenggaraan Upaya Kesehatan; 3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

1. Permasalahan Bidang Kesehatan di Jawa Barat

Berikut ini beberapa permasalahan bidang kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang masih ditemui di Provinsi Jawa Barat yakni:⁵

- a. Adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi, tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular dan penyakit tidak menular merupakan pertanda bahwa pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Jawa Barat belum optimal.
- b. Pembiayaan kesehatan di Provinsi Jawa Barat khususnya untuk menjamin pembiayaan kesehatan bagi yang belum memiliki kepesertaan BPJS kesehatan

⁴ Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

⁵ Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, <https://file.jabarprov.go.id/live/media/docs/archives/1702454643-RKPD-Jabar-2024---Part-1.pdf>

- masyarakat miskin untuk berobat di Rumah Sakit, melalui pembiayaan SKTM di rumah sakit belum optimal;
- c. SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai standar belum terpenuhi. Jumlah tenaga kesehatan, pelatihan bagi tenaga kesehatan masih terbatas.
 - d. Ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan/minuman belum terpenuhi;
 - e. Pengelolaan manajemen data dan informasi kesehatan serta regulasi kesehatan belum optimal. Diperlukan regulasi manajemen sistem informasi kesehatan provinsi;
 - f. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tahun 2021 baru mencapai 59,2 persen.
 - g. Gizi masyarakat yang rendah dan masih terdapatnya stunting, juga balita dengan gizi buruk.

Dari sekian banyak permasalahan yang ada, terkait kualitas layanan kesehatan di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.⁶ Dengan adanya keterbatasan ini tentu akan menghambat upaya untuk mencapai kesehatan yang merata dan meningkatkan harapan hidup masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan suatu pendekatan untuk mengatasi banyaknya tantangan tersebut. Pendekatan yang dimaksud harus melibatkan berbagai pihak yang terkait yakni masyarakat, sektor swasta dan tentu saja pemerintah. Pendekatan inilah yang disebut pendekatan holistik dan kolaboratif sehingga dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Jawa Barat.

2. Inovasi dan Kebijakan Pemerintah di Jawa Barat

Beberapa inovasi di bawah ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagian ada yang telah terlaksana di sebagian kabupaten/kota yang terdapat di berbagai wilayah Jawa Barat. Beberapa sudah terlihat keberhasilannya, namun di sisi lain masih harus disempurnakan. Bagaimana pemerintah Jawa Barat mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan SDGs dan mewujudkan Indonesia Sehat, diantaranya:

- a. Digitalisasi Layanan Kesehatan. Pemerintah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui digitalisasi seperti telemedicine, rekam medis elektronik, dan aplikasi kesehatan. Contohnya program “Top De Amor” (Tukang Ojeg Puskesmas dengan Elektronik Ambulan Motor)⁷ sebagai Inovasi dari Dinas Kesehatan di Puskesmas Banjarwangi, Garut, dengan memanfaatkan teknologi untuk pelayanan kesehatan.
- b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan. Masyarakat dapat mengakses dan pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas dan rumah sakit, serta penyediaan tenaga medis yang memadai terutama di daerah terpencil.⁸

⁶ <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/viewFile/70935/39322>

⁷ <https://pic.garutkab.go.id/site/read/kabupaten-garut-raih-penghargaan-best-practice-sdgs-jabar-award-2022>

⁸ <https://inovillage.id/artikel/sustainable-development-goals-sdg-s-mengurangi-ketimpangan>

- c. Peningkatan infrastruktur kesehatan, dengan membangun puluhan rumah sakit dan ribuan puskesmas baru.⁹ Hal ini bertujuan untuk memastikan akses yang lebih merata dan meningkatkan mutu layanan kesehatan di seluruh wilayah.
- d. Peningkatan akses dan pemerataan layanan. Dengan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mencapai lebih dari 82% penduduk, pemerintah berupaya mengatasi ketidakadilan akses layanan kesehatan. Namun masih ada tantangan dalam hal pemerataan dan kualitas layanan yang perlu terus diperbaiki.¹⁰
- e. Penguatan tenaga kesehatan. Penambahan infrastruktur kesehatan harus diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kesehatan, khususnya perawat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang baru dapat beroperasi dengan optimal dan memberikan layanan yang berkualitas.¹¹
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Partisipasi masyarakat akan lebih aktif diharapkan dapat membantu pemerintah menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.¹²
- g. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam layanan kesehatan seperti telemedicine, menjadi fokus untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.¹³

3. Program Mobile Puskesmas (MPus)

Penyelenggaraan program *Mobile* Puskesmas (MPus)¹⁴ tidak mempunyai dasar hukum yang lebih spesifik, melainkan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Dari ketentuan Perda tersebut, tersirat kewajiban pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan dan memberikan fasilitas kesehatan yang baik dan memadai bagi masyarakat. Salah satunya dapat diwujudkan melalui Mobile Puskesmas. Jadi, program MPus sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pemenuhan atas tanggung jawab tersebut.

Dalam teknis penyelenggaraan MPus memanfaatkan teknologi telemedicine. Terdapat aktivitas pemberian konsultasi jarak jauh dari dokter spesialis yang berpusat di Command Center Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah keterbatasan tenaga medis untuk hadir langsung menemui pasien. Dari program ini diketahui masyarakat yang berada di daerah terpencil mendapat akses fasilitas pemeriksaan layanan spesialis.

⁹ <https://infobai.id/strategi-jabar-tingkatkan-kualitas-pelayanan-kesehatan-masyarakat>

¹⁰ <https://theconnection.com/lebih-dari-82-penduduk-punya-kartu-jaminan-kesehatan-tapi->

[ketikadilanses-mengah-171638](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150108/1411779/pemenuhan-infrastruktur-dalam-meningkatkan-pembangunan-kesehatan/)

¹¹ <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150108/1411779/pemenuhan-infrastruktur-dalam-meningkatkan-pembangunan-kesehatan/>

¹² <https://www.kemkoptk.go.id/pemerintah-berupaya-memenuhi-pelayanan-kesehatan-masyarakat-secara-berkesinambungan>

¹³

https://www.academia.edu/77259047/PELAYANAN_BADAN_PENYELenggara_JAMINAN_SOSIAL_BPJS_KESEHATAN_DI_JAWA_BARAT

¹⁴ Program Mobile Puskesmas telah diresmikan langsung oleh Ridwan Kamil pada 15 April 2019

Aplikasi yang digunakan MPus adalah aplikasi kesehatan digital sehingga memungkinkan pasien berkonsultasi langsung dengan dokter yang dituju secara daring. Keuntungannya adalah membantu mengurangi kebutuhan untuk melakukan perjalanan jauh menuju fasilitas kesehatan, dan dapat mempercepat penanganan medis yang diperlukan. Manfaat lainnya adalah data yang dikeluhkan oleh pasien dapat tercatat dan otomatis dapat langsung terpantau dengan menggunakan sistem informasi kesehatan.

Pada tataran perencanaan, MPus termasuk program yang sangat baik. Namun pada kenyataannya program ini tidak implementatif. Artinya berbagai kendala dihadapi MPus, diantaranya terkait dengan operasional pembiayaan yang tidak murah.

Adapun program PUSPA, merupakan sebuah program yang direplikasi dari program nasional yang bernama Pencerah Nusantara, yakni sebuah Program Nusantara Sehat yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan RI, dan dilaksanakan di seluruh puskesmas-puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Salah satu programnya adalah penambahan dan penguatan tenaga kesehatan sehingga pada akhirnya bisa memperkuat, menyatu dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang sudah berada di puskesmas sejak awal.

Program PUSPA dapat mencapai target melalui dukungan dan adanya keterlibatan dari stakeholder. Pada setiap kegiatan dan pelayanan PUSPA, semua pihak membantu. Selain itu, semua lapisan masyarakat dapat dipersuasi dan dimobilisasi secara aktif. Integrasi program juga menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa tercapainya suatu tujuan. Di antara berbagai program yang ada terdapat saling keterkaitan yang tentu saja harus diintegrasikan.

Secara umum target PUSPA telah tercapai. Namun tidak puas sampai di sini, terdapat saran-saran bagi peningkatan PUSPA. Berikut ini beberapa hal yang disarankan yakni, SDM PUSPA harus terus dikuatkan dan ditingkatkan, adanya keberlanjutan program yang berkesinambungan, penguatan pentahelix (pihak-pihak yang relevan berkolaborasi), fokus program dan indikator keberhasilan PUSPA, kebutuhan logistik yang harus diperhatikan, serta pemilihan lokus PUSPA pada program berikutnya sehingga tercapai keberlanjutan.

PUSPA sebagai puskesmas terpadu, mengandung arti adanya suatu proses yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait sehingga terjalin semangat kolaborasi di antara semua pihak tersebut. Penguatan Puskesmas dilakukan dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor ketiga, yakni Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Jadi, program PUSPA yang digulirkan Pemerintah Jawa Barat ini sejalan seiringan dengan target dan indikator TPB khususnya pada tujuan ketiga.

KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk optimalisasi program demi terciptanya tujuan SDGs khususnya pada bidang kesehatan. Banyak permasalahan terkhusus di bidang kesehatan di wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan peran teknologi. Diharapkan, pengembangan inovasi ini bisa dilakukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Jawa Barat pada khususnya. Selain itu, dalam hal mengatasi berbagai tantangan yang ada, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif,

melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Berkelanjutan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan untuk Penyelenggaraan Upaya Kesehatan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Lingkungan Hidup
Seri Menyongsong SDGs Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2018
Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
<https://file.jabarprov.go.id/live/media/docs/archives/1702454643-RKPD-Jabar-2024---Part-1.pdf>
<http://ps://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/viewFile/70935/39322>
<https://pic.garutkab.go.id/site/read/kabupaten-garut-raih-penghargaan-best-practice-sdgs-jabar-award-2022>
<http://ps://innovilage.id/artikel/sustainable-development-goals-sdgs-mengurangi-kegiatan>
<http://ps://infobaik.id/strategi-jabar-tingkatkan-kualitas-pelayanan-kesehatan-masyarakat>
<http://theconversation.com/lebih-dari-82-penduduk-punya-kartu-jaminan-kesehatan-tapi-kegiatan-akses-masih-menganga-171638>
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150108/1411779/pemenuhan-infrastruktur-dalam-meningkatkan-pembangunan-kesehatan/>
<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-berupaya-memenuhi-pelayanan-kesehatan-masyarakat-secara-berkesinambungan>
http://ps://www.academia.edu/77259047/PELAYANAN_BADAN_PENYELANGGARA_JAMINAN_SOSIAL_BPJS_KESEHATAN_DI_JAWA_BARAT